

Judul : Al-Khoziny ambruk: evaluasi tata kelola bangunan pesantren
Tanggal : Rabu, 15 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Al-Khoziny Ambruk

Evaluasi Tata Kelola Bangunan Pesantren

WAKIL Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendukung langkah Pemerintah melakukan penataan dan standarisasi infrastruktur bangunan pesantren di seluruh Indonesia. Hal ini menyusul tragedi ambruknya masjid di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) yang menewaskan lebih dari 67 santri.

"Kita tidak boleh lagi membiarkan pembangunan infrastruktur pesantren berlangsung tanpa standar kelayakan dan keselamatan yang memadai," kata Huda dalam keterangannya, Selasa (14/10/2025).

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bakal membuat aturan khusus dan mengevaluasi bangunan pesantren dan madrasah pasca ambruknya masjid di Ponpes Al-Khoziny. "Ponpes, madrasah dan rumah ibadah betul-betul harus memenuhi standar yang telah ditentukan Pemerintah dalam hal persyaratan teknis yang harus dilakukan," kata Nasaruddin, Kamis (1/10/2025).

Huda melanjutkan, negara harus hadir memastikan keamanan dan kenyamanan para santri yang tinggal dalam jangka waktu lama di lingkungan pesantren. Selama ini pembangunan infrastruktur pesantren cenderung diserahkan sepenuhnya kepada inisiatif

masyarakat. Pemerintah belum memiliki mekanisme yang tegas dalam memastikan setiap pembangunan memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan bangunan.

Selama ini, ungkap Huda, banyak pesantren berdiri secara swadaya masyarakat. Mereka mengandalkan kemampuan finansial pengasuh dan donasi dari masyarakat. "Di sinilah negara harus hadir," tegasnya.

Bagi pesantren yang telah lama berdiri dan terbukti memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan nasional, kata Huda, negara memiliki tanggung jawab moral untuk membantu penyediaan infrastruktur yang layak dan aman. Sebab pesantren adalah pilar pendidikan yang telah mencetak jutaan lulusan berkualitas.

Selain itu, Huda mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Iskandar untuk menata pembangunan infrastruktur pesantren di tanah air. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam memperhatikan kualitas fasilitas pendidikan keagamaan di Indonesia.

Terkait pembangunan kembali Pondok Pesantren Al-Khoziny, Huda meminta Pemerintah untuk segera memberikan bantuan nyata.



Syaiful Huda

Terlebih pesantren ini telah berusia ratusan tahun dan menghasilkan banyak lulusan unggulan di bidang agama maupun umum. "Jadi negara wajib membantu agar keberlanjutan pendidikan di Al-Khoziny tetap terjamin," kata legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini.

Huda menegaskan, proses hukum yang tengah dilakukan oleh Polda Jatim terkait dugaan kelalaian dalam peristiwa tersebut harus tetap dihormati. Namun demikian, upaya penegakan hukum tidak menghambat proses pemulihan dan pembangunan kembali fasilitas pendidikan. "Ini musibah besar. Yang paling sedih tentu pengasuh dan keluarga besar pesantren," imbuhnya.

Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menambahkan,

tragedi ambruknya masjid di Ponpes Al-Khoziny menjadi peringatan keras bagi dunia pendidikan keagamaan di Indonesia. Peristiwa tersebut adalah alarm penting yang harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan keselamatan santri di seluruh pesantren tanah air.

"Tradisi pesantren yang melibatkan santri dalam kegiatan pembangunan memang bertujuan mulia. Tapi keselamatan tetap nomor satu," tegas Mufti dalam keterangannya, Selasa (14/10/2025).

Selain itu, Mufti berharap, apa yang terjadi di Al-Khoziny harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan hanya bagi satu pondok, tapi bagi seluruh pesantren di Indonesia. Ini saatnya seluruh pihak menata kembali tata kelola pembangunan di lingkungan pesantren.

Mufti mengingatkan Pemerintah agar tidak hanya fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pembelajaran, tetapi juga memperhatikan infrastruktur dan keselamatan di pesantren. Sebab selama ini perhatian negara terhadap pesantren lebih banyak berhenti di soal pengembangan SDM dan pembelajaran. "Tapi sangat minim pada aspek infrastruktur dan keselamatan," kritik politikus PDIP ini.

Dia bilang, beberapa pengasuh pesantren punya iktikad untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Tapi, mereka terhambat kemampuan finansial. Mengurus IMB dan PBG harus menggunakan jasa konsultan perencanaan yang biayanya tidak murah. "Se-suatu yang bagi pesantren sangat berat, karena uang mereka sebagian besar berasal dari iuran santri dan donasi masyarakat," jelasnya.

Yang paling membuat sedih, kata dia, banyak pesantren yang diperlakukan sama seperti pelaku usaha. Mereka dikenakan biaya, aturan, dan birokrasi yang sama seperti ketika seseorang ingin membangun ruko, gedung bisnis, atau pusat perbelanjaan. "Padahal pesantren bukan entitas bisnis. Mereka adalah lembaga pendidikan keagamaan yang menanggung amanah moral, sosial, dan spiritual bangsa," kata dia.

Untuk itu, Mufti mengusulkan agar Pemerintah membuat kebijakan afirmatif yang berpihak pada pesantren dalam pengurusan IMB, PBG, dan konsultasi teknis pembangunan. Jangan lagi pesantren dipersulit dan diperlakukan seperti investor yang sedang mencari untung. "Mereka tidak sedang berbisnis, tapi sedang mendidik manusia," tegasnya. ■ TIF